



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 2609–2618

Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Ratu Nazwa Khaerunisa, Eli Apud Saepudin

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Serang Banten Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2981>

How to Cite this Article

APA : Khaerunisa, R. N. ., & Apud Saepudin, E. (2025). Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2609 – 2618. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2981>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Ratu Nazwa Khaerunisa^{1*}, Eli Apud Saepudin²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang Banten Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: ratunazwakhaerunisa@gmail.com

Diterima: 23-01-2025

| Disetujui: 24-01-2025

| Diterbitkan: 25-01-2025

ABSTRACT

Optimal use of regional assets is one of the important keys in realizing sustainable development at the regional level. Regional assets in the form of land, buildings and natural resources can be used to support increasing regional original income (PAD), improving the quality of infrastructure and supporting community welfare. This research aims to examine strategies for optimizing the use of regional assets in order to support sustainable development goals. This research uses a qualitative analysis approach by exploring various literature sources and case studies from areas that are successful in asset management. The main findings show that an effective regional asset utilization strategy includes a balanced economic, social and environmental approach. The application of information technology in asset management and increasing human resource capacity are important factors in optimizing regional asset management. In addition, asset utilization must pay attention to the principles sustainability, avoid excessive exploitation of natural resources, and prioritize the long-term interests of society. With the right strategy, regional asset management can contribute significantly to achieving sustainable development goals involving economic, social and environmental aspects.

Keywords: Regional Assets Optimization, Sustainable Development, Regional Income, Asset Management

ABSTRAK

Pemanfaatan aset daerah secara optimal merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Aset daerah berupa tanah, bangunan, dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas infrastruktur, dan penunjang kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan mengeksplorasi berbagai sumber pustaka dan studi kasus dari daerah yang berhasil dalam pengelolaan aset. Temuan utama menunjukkan bahwa strategi pemanfaatan aset daerah yang efektif mencakup pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berimbang. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan aset dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, pemanfaatan aset harus memperhatikan asas keberlanjutan, menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan mengutamakan kepentingan jangka panjang masyarakat. Dengan strategi yang tepat, pengelolaan aset daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Katakunci: Optimalisasi Aset Daerah, Pembangunan Berkelanjutan, Pendapatan Daerah, Manajemen Aset

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan penting yang harus dicapai oleh semua negara, termasuk Indonesia. Dalam mencapai tujuan ini peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan, respon dan perhatian pemerintah terhadap agenda pembangunan berkelanjutan diatur dalam peraturan presiden No.111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui perpres ini, pemerintah berkeinginan besar melakukan penyesuaian rancangan pembangunan berkelanjutan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Penyelarasan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rancangan kebijakan yang lebih terfokus lagi, berupa Aksi Rencana Nasional (ARN) dan Aksi Rencana Daerah (ARD). Untuk mencapai sasaran pembangunan ini, Indonesia menerapkan pola pembangunan dengan prinsip No One Will Be Left Behind, bahwa pelaksanaan pembangunan harus inklusif dan mencakup semua lapisan masyarakat, memastikan semua orang dapat memperoleh manfaat dari program pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tidak boleh berpusat di satu kawasan saja tetapi harus menyebar luas dan menyasar ke setiap daerah-daerah baik dari tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, sampai struktur terkecil sekalipun, yaitu pedesaan. Untuk mewujudkan semua ini, perlu adanya transparansi proses sinkronisasi pembangunan, bahwa program ini tidak boleh bersandar pada peran dan fungsi tunggal pemerintah, namun juga harus melibatkan semua pihak secara kolektif seperti halnya ormas, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Isu pembangunan menjadi salah satu isu sosial yang sangat mengundang perhatian banyak kalangan, baik pada tataran teoritis maupun praktik. Dalam tataran teoritis, perubahan paradigma pembangunan membawa pencerahan bagi perspektif pembangunan di negara berkembang, dimana kebutuhan masing-masing kelompok memerlukan sentuhan yang berbeda-beda. Hal ini berpengaruh pada paradigma pembangunan di Indonesia, setelah lebih dari tiga puluh tahun menganut pendekatan ‘top down’ yang cenderung sentralistik, pemerintah di masa reformasi ini bergerak pada paradigma pembangunan berbasis ‘pemberdayaan masyarakat’. Yang pada implementasinya tidak selalu berjalan sesuai rencana, berbagai permasalahan bermunculan baik dalam tataran struktural maupun individu, mempengaruhi proses pemberdayaan tersebut.

Hal ini disebabkan kurang siapnya infrastruktur birokrasi dan minimnya sumber daya yang memadai untuk pelaku aktif dalam proses pembangunan. Sedangkan pada tataran praktik, isu pembangunan menjadi semakin nyaring dibicarakan seiring munculnya persoalan pembangunan yang selama ini mengancam stabilitas dan keberlangsungan hidup masyarakat global seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga pada isu paling krusial seperti pencemaran lingkungan. Berbagai gagasan pembangunan bermunculan, tujuannya tidak lain untuk memecahkan persoalan di atas, salah satunya adalah gagasan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi solusi, tidak saja dalam mereduksi kemiskinan dan ketimpangan sosial, namun juga dalam hal pemberdayaan dan pemanfaatan alam sosial yang proporsional dan berkelanjutan. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah pengelolaan aset daerah yang harus efektif dan efisien. Aset daerah merupakan sumber daya yang sangat berharga dan memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah. Aset daerah ini mencakup semua barang milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk aset bergerak dan tidak bergerak. Pemanfaatan aset ini sering kali belum optimal, sehingga diperlukan pendekatan strategis untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah menjadi aspek penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun, pengelolaan aset daerah yang belum optimal masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia.

Hal ini menyebabkan kurangnya pendapatan daerah, kurangnya kualitas pelayanan publik, dan kurangnya kemampuan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan aset ini harus dilakukan oleh organisasi secara efektif dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang baik dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang baik maka pemerintah daerah harus menerapkan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut beberapa penjelasan tentang prinsip-prinsip tersebut:

- 1) Profesional: Pengelolaan aset daerah harus dilakukan oleh aparat pemerintah yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen aset. Hal ini dipastikan bahwa setiap aset dikelola secara cermat, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis yang tepat. Profesionalisme juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses pengelolaan.
- 2) Transparan: Transparansi dalam pengelolaan aset daerah sangat penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses informasi terkait penggunaan dan kondisi aset daerah. Hal ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan korupsi, serta meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah daerah.
- 3) Akuntabel: Akuntabilitas berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah perlu memiliki system pelaporan yang jelas dan dapat diaudit untuk memastikan bahwa penggunaan aset sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 4) Efisien: Efisiensi dalam pengelolaan aset daerah berarti menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal, meminimalkan pemborosan, dan memaksimalkan hasil yang diperoleh. Ini termasuk pengelolaan yang tepat waktu dan biaya yang efisien dalam pemeliharaan dan pemanfaatan aset.
- 5) Efektif: Pengelolaan aset daerah yang efektif berarti sudah memenuhi target jangka panjang dari pemanfaatan aset yang sudah tercapai. Ini bias mencakup peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penyediaan layanan publik yang lebih baik, atau pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan aset ini harus berfokus pada pencapaian hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dalam pengelolaan aset daerah akan memastikan bahwa pemerintah daerah dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh pemerintah setelah menerapkan prinsip-prinsip dasar ini:

- 1) Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Aset: Pengelolaan aset yang dilakukan secara profesional dan efisien akan memastikan bahwa setiap aset dimanfaatkan secara maksimal, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan: Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas akan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik,

- 2) dan memastikan penggunaan aset daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- 3) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Dengan pengelolaan yang efisien dan efektif, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi aset yang ada untuk mendatangkan pendapatan, seperti melalui penyewaan, pengembangan kawasan ekonomi, atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- 4) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Prinsip-prinsip tersebut akan mendukung penggunaan aset daerah yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Ini akan memastikan bahwa pemanfaatan aset berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 5) Meminimalkan Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan Aset: Dengan prinsip transparansi, pengelolaan aset daerah yang terbuka dan dapat dipantau secara berkala akan mengurangi peluang penyalahgunaan dan korupsi. Akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan akan memastikan bahwa aset digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi prioritas nasional tetapi juga menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan aset secara optimal. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan aset daerah menjadi elemen kunci untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Melalui penerapan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi aset untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini juga akan meningkatkan tata kelola pemerintahan, mendorong kepercayaan publik, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan atau korupsi

Tinjauan pustaka ini menyajikan berbagai referensi dan penelitian yang relevan mengenai strategi optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama adalah bagaimana pengelolaan aset daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

1) Konsep Aset Daerah

Aset daerah mencakup semua barang milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

2) Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah melibatkan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial dari aset tersebut. Penelitian oleh Supriyadi (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan aset dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memudahkan pemantauan kondisi aset secara real-time.

3) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Banyak penelitian menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan PAD. Misalnya, penelitian oleh Rahman et al. (2019) menunjukkan bahwa optimalisasi BMD melalui penyewaan dan kerjasama dengan pihak ketiga dapat meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan. Penelitian ini juga menekankan perlunya kebijakan yang mendukung pengelolaan aset untuk memaksimalkan potensi pendapatan.

4) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Brundtland Report (1987), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, pengelolaan aset daerah yang baik dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1) Studi Kasus

Beberapa studi kasus menunjukkan praktik terbaik dalam pengelolaan aset daerah. Di Kabupaten Kebumen, penggunaan metode K-means clustering untuk mengelompokkan aset berdasarkan karakteristik tertentu telah membantu dalam merumuskan strategi pemanfaatan yang lebih efektif (Setiawan, 2021). Selain itu, di Provinsi Maluku, evaluasi terhadap pengelolaan BMD menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan dukungan regulasi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan (Halim et al., 2022).

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan strategi kunci dalam meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi aset yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi inovasi dalam pengelolaan aset dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah guna mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Metodologi yang digunakan mencakup penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian berbasis dokumen. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini menggunakan literatur atau bahan bacaan untuk mengumpulkan data dan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan bisa berupa buku, catatan, laporan penelitian, majalah, surat. Data yang diperoleh bersifat sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelumnya dan diakses untuk dianalisis ulang. Penelitian Dokumentasi Metode penelitian ini menggunakan dokumen tertulis untuk mendapatkan data dan dokumen yang digunakan yaitu e-book, jurnal dan surat resmi. Dalam konteks ini, data yang diperoleh melalui internet, seperti laporan resmi, data statistik online, atau artikel akademik, juga masuk dalam kategori ini. Penelitian Berbasis Internet atau Online Research Pencarian data dilakukan melalui platform daring (online), yaitu sumber artikel jurnal, laporan resmi, data statistik, situs web, blog, forum, media sosial, atau publikasi online lainnya maka pendekatan ini sering disebut penelitian berbasis internet. Teknik mengumpulkan data ini diambil dari situs web menggunakan alat atau kode pemrograman. Namun, validitas sumber data tetap perlu diperiksa agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik:

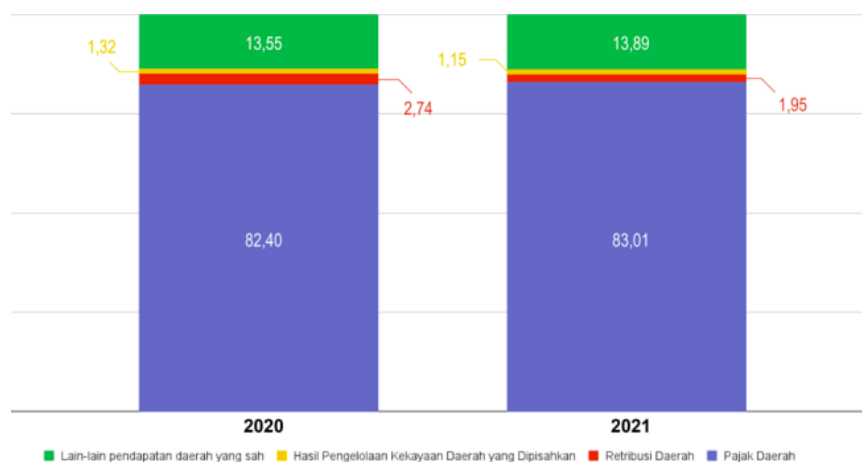
Sifat Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, bukan oleh peneliti yang sedang melakukan studi. Data ini tersedia dalam bentuk laporan, dokumen, statistik, atau publikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi tambahan. Metode Pengumpulan: Melakukan studi literatur dengan mengakses sumber-sumber akademik atau sumber tepercaya yang tersedia di internet. Cara peneliti mendapatkan informasi dengan mengakses, memperoleh, dan menggunakan data yang sudah tersedia dari berbagai sumber. Sumber Data Jurnal Ilmiah, artikel online, laporan penelitian, Dokumen Resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah hasil utama dari beberapa sumber yang saya dapat Kondisi Aset Daerah Dalam Pengamatan di lapangan yang sering terjadi di Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam hal pengelolaan aset masih cenderung belum profesional, pengamanan dan pemanfaatan aset yang masih belum optimal sehingga banyaknya aset-aset daerah Provinsi Banten yang hilang dan tidak tercatat bahkan tidak dimanfaatkan secara tepat sehingga tidak terpelihara dengan baik. Adapun aset-aset berupa kendaraan dinas yang batas waktu pakainya telah habis dan belum dikembalikan atau belum dilakukannya perpanjangan perjanjian pinjam pakainya bahkan adapula yang tidak terlacak seperti aset kendaraan dinas yang masa pinjamnya telah habis tersebut. Ketika melakukan pemeliharaan aset yang terjadi adalah aset yang telah disewakan/dimanfaatkan oleh pihak ketiga masih dibiayai dari APBD, seharusnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga untuk melakukan pemeliharaan (seperti, perbaikan, kebersihan, atau perawatan teknis). Namun, pada kenyataannya, tanggung jawab tersebut masih ditanggung oleh pemerintah daerah melalui anggaran belanja daerah (APBD), hal ini terjadi karena SDM yang mengelola aset daerah tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait pengaturan dan pengelolaan aset, termasuk aspek kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga. Akibatnya, tidak bisa mengatur tanggung jawab pemeliharaan aset dan sering kali tidak disusun dengan jelas, atau tidak diawasi secara efektif. Kegiatan pengamanan dan pemanfaatan juga sering bermasalah karena banyak aset yang dibiarkan begitu saja khususnya lahan dan bangunan yang mangkrak tidak dimanfaatkan dan tidak dijaga sehingga dipakai oleh masyarakat tanpa ijin karena dianggap tidak bertuan atau tidak terlihat pengelolaan dari pemerintah yang kemudian berakibat menjadi konflik sosial karena masyarakat akan menolak untuk meninggalkannya sehingga akan sulit ketika suatu saat ingin dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Perlunya sistem pengelolaan yang lebih profesional dan efisien agar aset yang telah dimanfaatkan dapat memberikan kontribusi optimal kepada daerah tanpa membebani anggaran daerah.

Gambar 1

Distribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten Tahun 2020-2021 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, diolah

- 1) **Pengelompokkan Aset :** Melalui penggunaan algoritma K-means clustering, aset tanah di Kabupaten Kebumen berhasil dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, menghasilkan tiga cluster utama dengan rekomendasi pemanfaatan yang berbeda. Cluster pertama direkomendasikan untuk pembukaan usaha, cluster kedua untuk persewaan dengan sistem bagi hasil karena aset di kelompok ini mungkin lebih cocok untuk kerja sama dengan pihak lain tanpa mengubah kepemilikan, dan cluster ketiga untuk peningkatan nilai aset melalui perubahan status, misalnya perubahan status hukum, zonasi, atau pengembangan kawasan untuk meningkatkan daya tarik ekonominya. Dampak ini sangat membantu pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang lebih terarah dan berbasis bukti (data-driven), sehingga pemanfaatan aset tanah menjadi lebih optimal dan sesuai dengan karakteristik serta potensi masing-masing kelompok.
- 2) **Peningkatan Kapasitas SDM:** Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan aset. Maka diwajibkan untuk mengikuti pelatihan teknis guna menunjang kompetensi dan meningkatkan kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi modern yang relevan dengan pengelolaan aset, seperti sistem informasi geografis (GIS), manajemen aset berbasis digital, atau alat analitik lainnya. Pelatihan ini membantu SDM memahami prosedur, kebijakan, dan inovasi dalam pengelolaan aset, sehingga mereka mampu menangani tantangan pengelolaan aset secara lebih efektif. Tujuan pemerintah meningkatkan kapasitas SDM **melalui pelatihan teknis dan penguasaan teknologi** yaitu untuk mencapai pengelolaan aset yang lebih efisien, mengurangi pemborosan sumber daya, dan memastikan aset daerah dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
- 3) **Regulasi dan Kebijakan:** Regulasi yang jelas memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah, sehingga mereka memahami langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti. Maka dari itu diperlukan regulasi yang komprehensif guna membantu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, sehingga pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Regulasi ini memastikan bahwa pengelolaan aset daerah selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan yang ditetapkan tidak hanya mengarahkan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan kejelasan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang menggunakan aset tersebut. Dengan adanya regulasi yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset yang dimiliki memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan aset, pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru yang mandiri, seperti melalui penyewaan aset, kerja sama dengan pihak swasta, atau pengembangan kawasan strategis. Dan juga optimalisasi aset memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan pendapatan yang dihasilkan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Berikut beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembahasan ini adalah:
 - 1) **Efektivitas Organisasi Pengelola Aset:** Pengelolaan aset harus dilakukan oleh organisasi yang efektif dengan struktur yang jelas. Struktur organisasi yang jelas dapat membantu dalam memperjelas tanggung jawab antarbagian dan memastikan komunikasi yang efektif di antara pihak-pihak terkait. Peningkatan eselonisasi dalam organisasi pengelola aset dapat mempermudah dalam mengambil keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi kebijakan yang lebih cepat dan efektif. Dengan ini memungkinkan organisasi pengelola aset memainkan peran yang lebih strategis

dalam pengembangan daerah, tidak hanya sebagai pengelola administratif. Maka Organisasi pengelola aset harus memiliki target yang terukur guna membantu organisasi menetapkan prioritas, seperti mengoptimalkan aset untuk bisnis, penyewaan, atau proyek strategis yang mendukung PAD.

- 2) **Inovasi dalam Pemanfaatan Aset:** Pendekatan yang inovatif seperti penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan aset dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta juga membantu pemanfaatan aset juga dalam membuka peluang baru bagi pendapatan daerah. Dengan kerjasama melalui skema seperti build-operate-transfer (BOT) atau joint venture ini dapat membuka peluang investasi baru dan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sebelumnya tidak produktif. Sehingga menarik investasi dari pihak swasta untuk mengembangkan aset, seperti membangun infrastruktur dan fasilitas baru, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi ekonomi daerah.
- 3) **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab, serta mendorong keberlanjutan program-program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor usaha kecil dan menengah yang berbasis aset daerah, contoh koperasi yang mengelola kawasan wisata berbasis aset daerah telah berhasil meningkatkan pendapatan dan memperkuat peran masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola aset. Selain itu, regulasi yang mendukung dan forum dialog untuk pengawasan pemanfaatan aset dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan aset daerah, tetapi juga menjamin keberlanjutan program pembangunan untuk kesejahteraan bersama.
- 4) **Evaluasi Berkelanjutan:** Pelaksanaan strategi optimalisasi harus diikuti dengan evaluasi berkala untuk menilai efektivitasnya. Evaluasi ini dilakukan secara triwulanan dengan melibatkan tim khusus, termasuk pemerintah daerah, auditor independen, dan perwakilan masyarakat. Pengukuran kinerja harus dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan PAD tercapai dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur kontribusi aset terhadap PAD, tingkat pemanfaatan aset, dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Data yang harus dikumpulkan mencakup tingkat pendapatan dari aset, biaya pemeliharaan, dan tingkat kepuasan masyarakat, yang dianalisis menggunakan teknologi seperti dashboard monitoring untuk visualisasi real-time. Dan berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan strategi guna memastikan tujuan tercapai secara optimal. Penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa optimalisasi aset daerah memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pemanfaatan teknologi, pengelolaan berbasis data, pelibatan masyarakat, penguatan regulasi, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan langkah strategis ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD secara signifikan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memastikan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

KESIMPULAN

Pembangunan berkelanjutan adalah prioritas nasional yang memerlukan peran aktif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Optimalisasi pengelolaan aset daerah berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki pelayanan publik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Penerapan prinsip pengelolaan

yang profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif guna memastikan aset daerah memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara maksimal. Pengelolaan yang baik juga dapat meminimalkan risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan menguraikan konsep aset daerah, strategi optimalisasi pemanfaatan aset, pentingnya kontribusi aset terhadap PAD, serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta regulasi yang mendukung adalah factor penting dalam pengelolaan aset daerah yang lebih optimal. Selain itu, pengelolaan aset daerah yang strategis dan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Kegiatan Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan strategi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan utama yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan aset di Pemerintah Daerah Provinsi Banten saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pencatatan yang kurang profesional, aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal, dan konflik sosial akibat pengelolaan yang kurang baik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola aset, mulai dari pencatatan, pemanfaatan, hingga pengamanan aset daerah.
- 2) Dengan memanfaatkan teknologi seperti algoritma K-means clustering, aset dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya untuk direkomendasikan pemanfaatan yang spesifik dan sesuai. Pendekatan berbasis data ini membantu pengambilan keputusan yang lebih terarah. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan penguasaan teknologi modern sangat diperlukan untuk mengelola aset secara efisien dan efektif. Menggunakan teknologi informasi, seperti GIS dan dashboard monitoring, sangat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, serta membantu memantau kinerja aset secara real-time.
- 3) Regulasi yang komprehensif sangat penting untuk memberikan pedoman dalam menjalankan pengelolaan aset yang jelas dan memastikan keselarasan dengan visi pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang melibatkan masyarakat dan pihak ketiga ini mampu meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program.
- 4) Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan aset daerah dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dapat membantu menciptakan peluang ekonomi baru dan mendukung pembangunan inklusif.
- 5) Strategi optimalisasi aset ini harus diiringi dengan evaluasi secara berkala yang terukur dan berbasis data. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis data yang terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai efektivitas strategi, melakukan penyesuaian, dan memastikan manfaat yang maksimal dari aset daerah.
- 6) Dengan pengelolaan yang optimal, aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang mandiri, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, dan mendanai proyek pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Langkah ini mendukung pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara garis besar, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam mengelola aset daerah, yang mencakup inovasi teknologi, penguatan regulasi, pengelolaan berbasis data, pelibatan

masyarakat, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat meningkatkan PAD secara signifikan dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyansyah, A., Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 10–24. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5901>
- Fajriantina Lova, E., & Rizqi Amaliyah, A. (2022). Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Manajemen Pelayanan Publik Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 168–175. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1346>
- Hasbiah, S. (2021). Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Pada Kantor Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Al Iidara Balad*, 3(1), 53–74. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.3.1.31>
- Iza, I. N., Habibi, M. M., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalaml Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(4), 88–99.
- Karya Pamungkas, T., & Rosyanfikri, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36–45. <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>
- Malik, D. (2024). Pengaruh Kompetensi , Budaya Kerja dan Sosialisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 219–227.
- Putra, L. R., Majid, A. I., Cahyani, G. A., Ekasari, R. N., Aldama, Y., Hikmah, H., Devi, E. P., Alfrida, O. R., Aini, M., Agatha, Y. P., & Gunawan, R. I. H. (2020). Penertiban Administrasi Desa Menuju Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 246. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.8757>
- Rogate Telaumbanua, G., Waruwu, S., & Lase, D. (2022). Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 303–311. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.45>
- Sinaga, J. O., & Hidayat, R. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Nongsa Kota Batam. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(1), 7–14.
- Sotya Partiwi Ediwijoyo, Wakhid Yuliyanto, & Ari Waluyo. (2020). Meningkatkan pelayanan publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen dengan Sosialisasi dan PenyuluhanTata Kelola Administrasi Desa. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 354–363. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v1i3.412>
- Susanti, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1526>
- Undaan, K. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 101–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>